



## Strategi Pembangunan Sektor Pertanian Dan Ketahanan Pangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Sandy Setya Azzurri

UIN Sunan Ampel Surabaya/Ilmu Ekonomi/Fak Ekonomi Dan Bisnis Islam

Email: sendysetya1@gmail.com

Received: July 03, 2023; Published: February 28, 2024

### ABSTRACT

*The agricultural sector is an important sector in the country's economy. Based on the Gross Domestic Product (GDP), agriculture is one of the sectors that contributes a large number of jobs, resulting in a large proportion of GDP. However, this sector faces a big challenge, namely agricultural liberalization which causes the farmer's surplus to fall. Agricultural liberalization is not in accordance with the principle of populist economy which aims to improve people's economic welfare. This study aims to determine the implementation of the agricultural sector on the concept of people's economy. The method used in this research is a literature study with secondary data sources. Secondary data, namely data collected by data collection agencies and made public, was used in this study. Secondary data was obtained from various references such as literature studies, relevant books, journals, articles and other sources relevant to the research topic.*

*The results of the research show that the implementation of the agricultural sector in the community system has been carried out since President Soekarno until now President Joko Widodo. However, this policy was not implemented optimally due to challenges faced such as the liberalization of the agricultural sector, inadequate infrastructure and the program was stopped or not continued. Some of the strategies carried out are holding BUMN food, fixing prices on commodities, developing cooperatives, and agrarian reform.*

**Keywords:** Agricultural Sector, Food Security, People's Economy

### ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam perekonomian negara. Berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), pertanian menjadi salah satu sektor yang menyumbang lapangan pekerjaan yang besar sehingga proporsi PDB yang besar. Namun sektor ini menghadapi tantangan besar yaitu liberalisasi pertanian yang menyebabkan surplus petani turun. Liberalisasi pertanian tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sektor pertanian pada konsep ekonomi kerakyatan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur dengan sumber data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan untuk umum, digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti studi kepustakaan, buku relevan, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.



Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari sector pertanian pada system kerakyatan telah dijalankan sejak presiden Soekarno hingga saat ini presiden Joko Widodo. Namun kebijakan tersebut kurang maksimal untuk dijalankan disebabkan tantangan yang dihadapi seperti liberalisasi sektor pertanian, infrastruktur kurang memadai dan program tersebut terhenti atau tidak dilanjutkan. Beberapa strategi yang dilakukan adalah holding BUMN pangan, penetapan harga pada komoditas, pengembangan koperasi, dan reforma agraria.

**Kata kunci:** Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi Kerakyatan

---

**How to cite:**

Nama penulis (2024). Judul artikel Strategi Pembangunan Sektor Pertanian Dan Ketahanan Pangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan *Journal of Economics Development Issues, Vol7(1)*, pp23-30.

<https://doi.org/10.33005/jedi.v5i2.144>

## PENDAHULUAN

Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian berdasarkan data dari Kementrian Pertanian 2008. Berdasarkan produk domestik bruto lapangan usaha, sektor Ini menjadi salah satu sektor yang menyumbang persentase besar. Dalam kurun waktu lima tahun 2013 hingga 2018 menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dinamis. Pada 2013, kontribusi sektor ini terhadap PDB adalah Rp 847,8 triliun. Pada tahun 2018, kontribusi telah meningkat Rp 157,6 triliun atau meningkat 18,6% menjadi Rp 1.005,4 triliun. Berdasarkan data tersebut, kontribusi sektor pertanian yang mencakup perkebunan, perikanan, pangan, kehutanan dan peternakan cukup tinggi dan dinamis. Kondisi strategis ini harus didorong dengan melakukan revitalisasi dan inovasi misalnya dari sisi produksi adalah peningkatan produktivitas dengan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dibantu oleh pemerintah seperti penyediaan traktor, bibit dan penyuluhan pertanian. Kebijakan ini seringkali berhadapan dengan tantangan yang bisa menurunkan kesejahteraan petani. Salah satu tantangan tersebut adalah liberalisasi sektor pertanian.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar untuk Produk Domestik Bruto, Indonesia belum bisa kembali menjadi negara agraris yang tidak mampu swasembada produk pertanian. Seperti diketahui hampir semua negara berkembang sebagian besar bekerja pada sektor agraris. Masyarakat seperti ini terancam akibat ratifikasi liberalisasi produk pertanian yang direkomendasikan oleh WTO demi meningkatkan produktivitas. Perdagangan bebas membuat produk mereka tergeser oleh produk impor. Bahkan membuat negara semakin bergantung dengan impor. Berbeda dengan Jepang yang masih terus mengenakan berbagai pembatasan ketat untuk impor beras, daging dan beberapa bahan pangan lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 2015 hingga 2020, impor beras yang dilakukan fluktuatif. Pada 2015, impor beras mencapai 861.601,0 dan naik menjadi 1.283.178,5 pada 2016. Tahun berikutnya, impor beras turun menjadi 305.274,6 lalu melonjak lagi bahkan tertinggi dalam 5 tahun terakhir yakni sebesar 2.253,824,5. Lalu pada 2020, jumlah impor mencapai titik terendah. Pada tahun tersebut, jumlah impor turun menjadi 356.286,3 ton. Menurut (Arifin, 2001) supply respon dari komoditas rendah karena musim, resiko usaha dan time lag menyebabkan menipisnya cadangan beras di Bulog sehingga berpotensi shortage menjadi penyebab impor.

Hasil produksi petani Indonesia selama ini selalu kalah bersaing dengan barang-barang impor baik dari sisi kualitas maupun dari harganya (Suseno & Suyatna, 2007) apabila tidak dilakukan intervensi, maka kesejahteraan petani akan turun. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani memunculkan gagasan ekonomi rakyat. Gagasan ekonomi rakyat dibangun dari kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah harus mempunyai intervensi yang besar. Dengan penguasaan oleh negara maka hajat hidup orang banyak yang dalam teori ekonomi disebut sebagai kebutuhan dasar manusia (human basic needs) dapat diproduksi dan didistribusikan secara lebih merata untuk setiap warga negara (Hosein, 2016).

Gagasan ini bertransformasi menjadi system ekonomi yang dikatakan Ir.Soekarno yakni meningkatnya peran masyarakat untuk ikut dalam penguasaan input dan bahan baku di Indonesia. Ini yang dimaksud dalam demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan. Gagasan ini juga didukung oleh Moh.

Hatta yang menyatakan selama demokrasi ekonomi tidak ada, maka manusia belum merdeka dan persaudaraan belum ada. Ini menjadi urgensi mengapa sistem ekonomi kerakyatan harus diimplementasikan, terutama di bidang pertanian. Tujuan ekonomi kerakyatan menurut (Baswir, 2010) dan (Malau, 2016) adalah mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. Saat ini keberadaan pertanian mampu menyelamatkan ekonomi masyarakat sehingga kebutuhan tetap terpenuhi. Sektor ini tetap tumbuh yang mana sektor lain jatuh karena terpengaruh krisis. Bahkan ekonomi kerakyatan memainkan fungsi penyelamatan di sektor kegiatan, fungsi penyelamatan ini terbukti pada sektor penyediaan kebutuhan rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi (Junaidi, 2011). Tentu ini berbeda dengan konsep monopoli yang mengutamakan kesejahteraan pemilik modal. Sejarah telah membuktikan betapa hampir semua bentuk monopoli merugikan rakyat dan perekonomian (Rosmiati, 2012).

Analisis implementasi ekonomi kerakyatan pada sector pertanian membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang konsep ekonomi kerakyatan dan membandingkan dengan implementasi pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang penulis analisis karena merupakan sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga disebut sebagai ekonomi rakyat

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Ekonomi Kerakyatan**

Menurut (Mubyarto, 1999) menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang demokratis yang bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Demokrasi ekonomi mempunyai 3 sifat yaitu musyawarah, cita massa protes dan tolong menolong (kolektivitas). Implementasi dari 3 sifat ini menurut Hatta adalah (1) tidak ada lagi ketimpangan pendapatan akibat golongan tertentu menguasai penghidupan masyarakat mayoritas. (2) keinginan masyarakat mayoritas menentukan kebijakan perusahaan untuk menghasilkan laba.

### **Kelembagaan Usaha Pertanian Di Indonesia**

Menurut (Nasrul, 2012), Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kesejahteraan biasanya dapat diukur melalui tingkat ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, baik dari sisi ketersediaan, kualitas, kelayakan, keragaman, dan kecukupan gizinya secara berkelanjutan (Aziza, 2019).

### **Kelembagaan Penguasaan Lahan Pertanian Di Indonesia**

Kelembagaan penguasaan lahan di Indonesia mulai dibentuk pada pemerintahan Presiden Soekarno melalui program Mekatani. Program ini berfungsi untuk melakukan pembukaan lahan baru di Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi untuk diberikan kepada petani lalu diberdayakan. Program ini sendiri merupakan implementasi dalam rangka mendukung reformasi agraria. Definisi Reforma Agraria sesuai Direktorat Jenderal Penataan Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Reformasi Agraria bertujuan supaya tanah dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara merata serta berkelanjutan (Rubaie, 2007).

### **Ruang Lingkup Pembangunan Sektor Pertanian**

Sektor pertanian memiliki ruang lingkup yang luas. Studi ini dapat dibagi menjadi tiga subsector yaitu penguasaan lahan, perusahaan lahan dan hub. kerja pertanian. Masing-masing subsector dapat memberikan pemahaman terkait gambaran sector pertanian saat ini sekaligus memberikan arahan bagaimana studi ini ditulis.

Pertama, terkait penguasaan lahan. Penguasaan lahan memiliki dampak pada sistem produksi pertanian. Untuk mendapatkan sumberdaya dari lahan pertanian, terdapat beberapa sistem kerjasama yang digunakan yaitu jual beli, sewa menyewa dan penyertaan modal (saham). Saat ini terdapat perubahan penguasaan lahan pertanian menjadi non-pertanian. Perubahan ini menyebabkan produktivitas turun

sehingga ketahanan pangan rentan. Pemerintah berupaya melakukan reformasi agrarian agar penguasaan lahan terdistribusi lebih merata. Kebijakan ini telah diimplementasikan sejak zaman Presiden Soekarno. Namun pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan papan (property).

Kedua, pengusahaan pertanian. Subsektor ini fokus bagaimana meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dengan melakukan efisiensi. Sejak pemerintahan Presiden Soekarno, peningkatan produktivitas mulai dilakukan dalam rangka kemandirian pangan dan swasembada. Beberapa kebijakan berhasil meningkatkan output, namun karena keterbatasan dana menyebabkan program ini tidak bisa diteruskan secara berkelanjutan.

Ketiga, hubungan kerja pada sector pertanian. Di sektor pertanian umumnya hubungan kerja bersifat buruh dan majikan. Ada dua pola yang menjelaskan hubungan kerja tersebut. Pola satu adalah kondisi dimana buruh bergantung sepenuhnya terhadap majikan dan pola dua adalah buruh dapat saling berhubungan dan mempunyai lebih dari satu majikan (Astuti, 2016). Pola hubungan ini juga mempengaruhi pemberian upah. Umumnya petani diperkerjakan majikan melalui borongan atau harian. Kegiatan borongan berarti tenaga kerja dibayar berdasarkan satuan output. Sedangkan kegiatan kerja harian dibayar berdasarkan jumlah hari bekerja.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu deskripsi penelitian yang menggunakan analisis kualitatif. Karena menggunakan penelitian kualitatif maka sumber data penelitian ini mengambil dari referensi literatur, data sekunder. Sumber referensi utama dari penelitian ini adalah semua karya ilmiah dengan tema ekonomi kerakyatan antara lain Manifesto Ekonomi Kerakyatan karangan Revrison Baswir. Karya ilmiah lain yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan seperti "Ekonomi Kerakyatan" karya Prof. Mubyarto, dkk. Kemudian makalah dan jurnal yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan kebijakan sektor pertanian di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (literature research), yakni mengumpulkan data dari referensi seperti buku, literatur, media dan bahan tertulis lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan Di Indonesia**

Ketahanan pangan saat ini menjadi salah satu topik pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Ketahanan pangan yang baik merupakan bentuk dampak turunan dari produktivitas sector pertanian. Ada beberapa peranan pertanian yang dianggap penting antara lain. Pertama, sektor pertanian membuka lapangan pekerjaan sehingga membuka kesempatan kerja dan sumber pendapatan. Meski ada penurunan penawaran tenaga kerja, namun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini masih besar. Di desa, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tenaga kerja sektor pertanian terus menurun dalam 30 tahun terakhir. Pada periode yang sama, penawaran tenaga kerja sektor industry (terdiri dari manufaktur dan non-manufaktur) serta jasa mengalami kenaikan. Terutama di sektor jasa, ada peningkatan yang berarti. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini telah membuat orientasi ekonomi Indonesia berubah dari agraris menjadi basis industry (Hidayat, 2014).

Kedua, komoditas pertanian menjadi kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi jumlah penduduk semakin meningkat sehingga komoditas pangan menjadi kebutuhan yang diprioritaskan dalam pemenuhan dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik konsumsi per kapita masyarakat tahun 2017 hingga 2021, jumlah konsumsi per kapita terhadap komoditas pangan seperti beras, telur ayam, gula pasir, cabe merah, cabe rawit tinggi. Dalam lima tahun terakhir, jumlah konsumsi beras perkapita kurang lebih 1,5 kg per minggu. Konsumsi telur ayam juga meningkat. Pada 2017 jumlah konsumsi telur per minggu adalah 2,1 kg. Lima tahun kemudian jumlah konsumsi telur meningkat 8,1% menjadi 2,28 kg. Pada komoditas cabai, tidak ada peningkatan konsumsi yang tajam (relative stabil). Konsumsi cabai merah meningkat tipis 0,1 dibandingkan tahun 2017. Konsumsi cabai sempat menyentuh angka tertinggi pada tahun 2019 yaitu 0,38 kg.

Setahun kemudian, jumlah konsumsi cabai menurun menjadi 0,32 kg. Dibandingkan cabai merah, cabai rawit memiliki angka yang lebih fluktuatif. Sempat menyentuh angka terendah pada 2017 yaitu 0,29 kg, komoditas ini meningkat drastis pada 2019 yaitu 0,38 kg. Dari kelima komoditas tersebut, jumlah konsumsi gula terus menurun. Pada 2017, jumlah konsumsi gula adalah 1,33 kg. Lima tahun kemudian, jumlah konsumsi gula adalah 1,28 kg per kapita.

Ketiga, sektor pertanian berkontribusi terhadap devisa negara. Komoditas pertanian menjadi salah satu produk orientasi ekspor yang dapat diandalkan dan dibutuhkan pasar dunia. Ekspor komoditas pangan menyumbang devisa negara sehingga real value of money dapat meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan ekspor sektor pertanian pada tahun 2017 hingga 2021. Dalam kurun lima tahun terakhir, jumlah ekspor pertanian terus meningkat. Pada 2017, nilai ekspor komoditas pertanian adalah 3,671 juta US\$. Pada 2021, total nilai ekspor meningkat 566.5 juta US\$ menjadi 4,237.5 juta US\$. Nilai ekspor ini meningkat 15% dan diprediksi akan terus naik dalam beberapa tahun mendatang. Ekspor ini meningkatkan devisa negara dan meningkatkan kemampuan negara dalam melakukan transaksi internasional.

Keempat, alih fungsi lahan sangat besar. Saat ini pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat lebih tinggi dibandingkan kenaikan luas lahan untuk bertani. Tercatat ada 87% petani dari total angkatan kerja atau 23 juta petani hanya memiliki lahan tidak sampai 2 hektare. Sisanya hanya memiliki kurang dari 0,5 hektare (Ananda, 2021). Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa pengalihan fungsi lahan pertanian tinggi meskipun fluktuatif. Berdasarkan data lahan sawah di 2009, luas lahan mencapai 8 juta hectare dan menurun menjadi 7,4 juta hectare pada 2019. Kebanyakan alih fungsi lahan pertanian digunakan untuk membangun pabrik dan infrastruktur seperti jalan. Di sisi lain, program pencetakan lahan pertanian yang digagas pemerintah hanya mampu mencetak kurang lebih 60 ribu hectare per tahun (Citradi, 2019). Otomatis dapat dipastikan setiap tahun Indonesia mengalami deficit lahan pertanian. Ini menyebabkan shortage mengingat kebutuhan akan pangan setiap tahun terus bertambah. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan pangan, pemerintah melakukan impor pangan hingga saat ini.

### **Implementasi Sektor Pertanian Pada Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan pada asas kekeluargaan, masyarakat yang berdaulat dan berkepribadian sesuai Pancasila. Beberapa prinsip ekonomi kerakyatan antara lain Intervensi yang besar oleh pemerintah. Perekonomian yang dijalankan secara efisien, adil, sustainable dan memberdayakan. Mekanisme alokasi sumberdaya melalui mekanisme pasar, campur tangan pemerintah dan koperasi Distribusi yang merata pada penguasaan input Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Hubungan mitra pelaku ekonomi dalam koperasi dan Tenaga kerja bisa memiliki saham.

Sedangkan menurut (Malau, 2016), sasaran ekonomi kerakyatan meliputi hal berikut tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat. Terselenggaranya pendidikan nasional secara gratis bagi setiap anggota masyarakat. Serta terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi. Beberapa prinsip ekonomi kerakyatan dapat dibandingkan dengan kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Pengujian ini dilakukan melalui praktik sistem ekonomi kerakyatan. Jadi kebijakan pemerintah dapat dibandingkan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang telah dibahas sebelumnya. Masing-masing kriteria akan dikaitkan dengan proses apa yang sudah dicapai di sektor pertanian. Kemudian proses pembelajaran dan evaluasi apa yang dapat diambil dari uji praktik sistem ekonomi kerakyatan ini. Uraian tentang aplikasi ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan di sektor pertanian diuraikan sebagai berikut.

### **Intervensi Pemerintah**

Saat ini pemerintah mengimplementasikan UU Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempercepat ekspor impor pangan. Kebijakan ini juga merupakan sinergi dengan BUMN supaya hasil

komoditas pangan terdistribusi secara merata. Misalnya BUMN kini membantu distribusi pangan dari produsen ke sentra konsumen menggunakan kereta api ke wilayah Indonesia bagian timur. Supaya sinergi ini semakin kuat maka pemerintah membentuk holding BUMN di bidang pangan supaya ekosistem pangan semakin teratur.

Holding BUMN di bidang pangan dilakukan dengan merger beberapa badan usaha seperti Perum Perikanan Indonesia, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan lain-lain. Holding BUMN ini dinamakan ID FOOD dimana induk badan usaha akan diambil alih oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Holding BUMN di bidang pangan bertujuan supaya program pemerintah di sektor pangan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.

Perlu diketahui bahwa penggabungan antar BUMN ini bukan hal gampang. Karena tidak semua badan usaha di BUMN menghasilkan laba dalam laporan keuangan terakhir. Supaya bisa menghasilkan laba, perlu ada perbaikan seperti: market share diperluas, sehingga bisa menang persaingan dengan badan usaha swasta, efisiensi dengan cara meningkatkan basis teknologi agar antar badan usaha bisa saling terkoneksi dan terintegrasi melalui Internet of Things (IoT), sinkronisasi produksi dari pembibitan, pertumbuhan, panen, pergudangan hingga didistribusikan ke ritel.

### **Efisiensi Ekonomi Berdasarkan Keadilan, Partisipasi dan Keberlanjutan**

Sektor pertanian memiliki karakteristik yang sama dengan struktur pasar persaingan sempurna yaitu barang homogen. Barang yang dihasilkan tidak bisa dibedakan dengan barang produsen lainnya. Ini menyebabkan harga ditentukan mekanisme pasar dan fluktuatif. Bila jumlah output di pasar rendah lebih tinggi dibandingkan biaya produksi rata-rata, maka petani mendapatkan premi supermarginal. Bila saat panen harga lebih rendah dibandingkan biaya produksi rata-rata, maka petani mengalami kerugian submarginal. Hal ini berlangsung terus menerus sehingga petani hanya bisa menentukan tingkat output yang diproduksi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai fluktuasi harga komoditas pertanian tahun 2011 hingga 2016. Minyak goreng dalam periode 2011 hingga 2016 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2011, harga minyak goreng per kg adalah sebesar Rp 12.909. Lalu pada 2016, harga minyak goreng naik menjadi Rp 13.859 yang berarti ada kenaikan Rp 950 atau 7,4%. Meski ada kebijakan Harga Patokan Petani (HPP) pada gula, namun nyatanya harga gula mengalami kenaikan hingga 36% dimana pada 2011 harga gula rata-rata adalah Rp10.818 dan 2016 adalah Rp 14.517. Pada komoditas lain seperti cabai menunjukkan ada fluktuasi harga karena mekanisme pasar. Harga cabai rawit maupun merah sempat turun pada 2011 masing-masing Rp 21.549 dan Rp 21.366. Namun harga cabai terus mengalami kenaikan hingga mencapai harga tertinggi pada 2016 yaitu Rp 37.650 pada cabai rawit dan Rp 39.333 pada cabai merah. Hanya dalam kurun waktu enam tahun, harga cabai naik sekitar 83%. Pada komoditas telur menunjukkan hal yang sama. Pada 2011 harga telur per kg adalah Rp 14.689 lalu enam tahun kemudian harga telur meningkat menjadi Rp 20.473. Harga telur telah meningkat 39%. Untuk menjaga harga komoditas stabil maka pemerintah dapat memonitoring pergerakan harga komoditas dalam satu sistem yang terpadu yang dihimpun dari banyak pasar di Indonesia. Cara ini memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga sebelum terjadi, melakukan kebijakan non-moneter seperti ceiling price dan floor price pada sebagian besar komoditas pangan.

### **Mekanisme Ekonomi Berdasar Atas Keadilan, Partisipasi dan Keberlanjutan**

Dalam ekonomi kerakyatan mekanisme alokasi sumberdaya dilakukan melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan koperasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka kesempatan untuk semua pelaku ekonomi dalam meningkatkan daya saing dan kompetensi (Basri, 2002). Namun kenyataannya alokasi sumber daya banyak menggunakan mekanisme pasar, bukan menggunakan koperasi. Ini bisa dilihat dalam struktur badan usaha di Indonesia, jumlah koperasi mengalami penurunan sejak dalam kurun waktu 14 tahun menurut data Badan Pusat Statistik jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2006 hingga 2020. Jumlah koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Pada tahun 2006, jumlah koperasi di Indonesia adalah 98.944 yang terdiri dari koperasi primer, pusat, gabungan dan induk. Jumlah koperasi terus

meningkat hingga mencapai jumlah tertinggi sebesar 152.174. Ini berarti dalam kurun waktu 12 tahun jumlah koperasi meningkat 53,7%. Namun jumlah koperasi aktif mengalami penurunan drastis pada 2018 menjadi 126.343 atau turun 20,4%. Satu tahun berikutnya, jumlah koperasi turun menjadi 123.048 sehingga dalam kurun waktu dua tahun persentase penurunan menjadi 23,7%. Pada 2020 jumlah koperasi mengalami perbaikan yang meningkat sebesar 4.076.

Koperasi dapat dikembangkan bila dikelola dengan cara yang inovatif. Koperasi harus dikembangkan dengan melihat basis komoditas, kawasan dan komunitas. Contohnya, mengembangkan koperasi dengan fokus pada menjual produk berbasis kearifan local, mengembangkan teknologi digital seperti database operasional dan pengawasan koperasi, dan memberikan pelatihan supaya pengelola koperasi memiliki kompetensi yang baik.

### **Pemerataan Penguasaan Faktor Produksi**

Pemerataan penguasaan factor produksi seperti tanah merupakan prinsip penting dalam ekonomi kerakyatan. Konsep reformasi agraria memiliki dua manfaat penting bagi masyarakat yaitu menjamin perlindungan akses masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan redistribusi lahan menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bila dibandingkan dengan negara lain, reformasi agraria terbukti mendorong transformasi ekonomi menjadi negara maju.

Salah satu contoh negara yang berhasil meningkatkan kesejahteraan melalui reformasi agrarian adalah Tiongkok. Fakta bahwa Tiongkok sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar membuat masyarakat harus dikendalikan supaya pembangunan ekonomi cepat tercapai. Misalnya, dengan luas lahan dan jumlah penduduk besar menyebabkan skala produksi harus besar supaya efisien. Hal ini membuat Tiongkok mampu memproduksi barang dengan efisien dan murah sehingga dapat bersaing dengan pasar dunia.

Sistem agraria ini nyatanya mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan ini berhasil menurunkan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan US\$1,25 per hari dari sekitar 84 persen di tahun 1981 menjadi 16 persen di tahun 2005 (Lesmana, 2010). Pemerintah terus mendorong supaya setiap petani memiliki lahan dan memberikan garansi regulasi kepemilikan lahan. Selain itu, pemerintah juga turut memiliki lahan terutama sumber daya alam vital, yang menyangkut hajat orang banyak. Sumber daya ini tidak dikuasai oleh swasta. Namun terdapat beberapa objek investasi milik pemerintah yang terbuka untuk asing sehingga mudah dalam melakukan pengawasan.

Pemerintah perlu mendorong reformasi agraria dengan mengintegrasikan dan melakukan sinergi antar kementerian/lembaga supaya dapat menyelesaikan masalah seperti tumpang tindih perizinan, sinkronisasi penataan asset, identifikasi tata ruang. Diharapkan dengan adanya kerjasama antar lembaga maka tujuan reformasi agraria yaitu pengurangan kemiskinan, lapangan pekerjaan tercipta, perbaikan akses tanah kepada masyarakat, penataan ulang kepemilikan lahan, mengurangi sengketa tanah, meningkatkan kelestarian lingkungan, dan meningkatkan ketahanan pangan.

### **Pola Hubungan Produksi Kemitraan**

Prinsip kelima dari ekonomi kerakyatan adalah dalam suatu usaha. Pola hubungan produksi bersifat kemitraan, bukan buruh dengan majikan. Di sektor pertanian umumnya hubungan kerja bersifat buruh dan majikan. Ada dua pola yang menjelaskan hubungan kerja tersebut. Pola satu adalah kondisi dimana buruh bergantung sepenuhnya terhadap majikan dan pola dua adalah buruh dapat saling berhubungan dan mempunyai lebih dari satu majikan (Astuti, 2016). Pola hubungan ini juga mempengaruhi pemberian upah. Umumnya petani diperkerjakan majikan melalui borongan atau harian. Kegiatan borongan berarti tenaga kerja dibayar berdasarkan satuan output. Sedangkan kegiatan kerja harian dibayar berdasarkan jumlah hari bekerja.

Pola hubungan yang baik menentukan produktivitas output. Oleh karena itu pola hubungan antar pelaku ekonomi harus equal, sederajat, saling terbuka dan kekeluargaan. Pola kemitraan yang benar memiliki

hubungan social seperti kekerabatan, ketentangan, kerukunan antar pelaku ekonomi. Petani juga harus meningkatkan kemampuan dan keterampilan supaya daya saing mereka meningkat.

## **SIMPULAN**

Sistem kerakyatan berarti masyarakat mempunyai kedaulatan dalam melakukan tindakan ekonomi. Sistem ini menggabungkan alokasi sumberdaya efisien melalui mekanisme pasar dan intervensi pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Beberapa prinsip dari sistem kerakyatan adalah intervensi pemerintah besar, perekonomian yang dijalankan secara efisien, adil, sustainable dan memberdayakan, mekanisme alokasi sumberdaya melalui mekanisme pasar, campur tangan pemerintah, koperasi, distribusi penguasaan input merata, koperasi sebagai soko guru perekonomian, kemitraan dalam bisnis, kepemilikan saham oleh tenaga kerja. Adanya prinsip ini diharapkan tujuan dari sistem ini tercapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa saat ini sektor pertanian dianggap penting karena mampu membuka lapangan pekerjaan, kebutuhan primer yang dibutuhkan masyarakat, pendorong industrialisasi dan berkontribusi terhadap devisa negara. Saat ini sektor pertanian menjadi sektor terbesar nomor dua sebagai penyumbang terhadap PDB. Namun sayangnya saat ini jumlah tenaga kerja pertanian mengalami penurunan. Padahal secara geografis, iklim dan sumber daya di Indonesia mendukung dalam rangka peningkatan produktivitas sektor ini. Namun saat ini jumlah sawah di Indonesia turun akibat alih fungsi lahan yang ada setiap tahun. Produktivitas sektor pangan dapat dijaga apabila kualitas sumber daya manusia dan teknologi ditingkatkan. Produktivitas sektor pertanian mampu menjaga tingkat ketahanan pangan suatu negara sehingga tidak bergantung pada impor.

Berdasarkan uraian diatas, Implementasi sistem kerakyatan pada sektor pertanian sebenarnya telah dijalankan sejak presiden Soekarno hingga kini presiden Joko Widodo. Namun kebijakan tersebut kurang maksimal untuk dijalankan disebabkan tantangan yang dihadapi seperti liberalisasi sektor pertanian, infrastruktur kurang memadai dan program tersebut terhenti atau tidak dilanjutkan. Saat ini pemerintah membentuk holding BUMN pangan dalam rangka mengintegrasikan produksi dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Holding BUMN perlu untuk memperluas market share, efisiensi dan sinkronisasi produksi. Dari sisi harga, sebagian besar harga ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga agar stabil pemerintah perlu memonitoring pergerakan harga dan kebijakan non-moneter. Koperasi perlu dikembangkan supaya kepemilikan factor produksi merata dengan menjual produk dengan basis kearifan local, teknologi digital dan pelatihan. Selain Koperasi kepemilikan factor produksi yang merata juga didukung dengan program Reforma Agraria. Adanya kepemilikan factor produksi merata membuat pola hubungan kerja bersifat mitra dan kekeluargaan sehingga kesejahteraan meningkat bersama-sama.

## **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil studi adalah sebagai berikut: Studi Ekonomi Kerakyatan saat ini masih terbatas sehingga penting agar Lembaga Pendidikan untuk ikut dalam rangka menggali wawasan dan kajian terkait dengan sector pertanian dan sistem ekonomi kerakyatan.

Peningkatan produktivitas sector pertanian ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah seperti reformasi agrarian. Peningkatan produktivitas dilakukan supaya ketahanan pangan dapat tercapai. Untuk mengimplementasikan prinsip ekonomi kerakyatan terutama pada bidang pertanian maka kebijakan harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani. Misalnya holding BUMN, pengaturan mekanisme pasar, pengembangan koperasi, reformasi agrarian dan perubahan kerjasama menjadi pola kemitraan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C., F. (2021). Sektor Pertanian: Harapan Pemulihan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Arifin, B. (2001). *Pertanian era transisi* (Cet. 1). Penerbit Universitas Lampung.
- Astuti, W. A. (2016). Hubungan Kerja Petani-Buruh Tani di Pedesaan dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Forum Geografi*, 7(1), 64.  
<https://doi.org/10.23917/forgeo.v7i1.4798>
- Aziza, T. N. (2019). *UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGAN*.
- Basri, F. H. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan harapan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia*. Erlangga.
- Baswir, R. (2010). *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (2nd ed.). Pustaka pelajar.
- Citradi, T. (2019). *Krisis Petani di Republik Indonesia*.
- Hidayat, A. (2014). *Sektor Pertanian: Perlu Upaya Akselerasi Pertumbuhan*.
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 503–528. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>
- Ananda, C., F. (2021). Sektor Pertanian: Harapan Pemulihan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Arifin, B. (2001). *Pertanian era transisi* (Cet. 1). Penerbit Universitas Lampung.
- Astuti, W. A. (2016). Hubungan Kerja Petani-Buruh Tani di Pedesaan dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Forum Geografi*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v7i1.4798>
- Aziza, T. N. (2019). *UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGAN*.
- Basri, F. H. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan harapan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia*. Erlangga.
- Baswir, R. (2010). *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (2nd ed.). Pustaka pelajar.
- Citradi, T. (2019). *Krisis Petani di Republik Indonesia*.
- Hidayat, A. (2014). *Sektor Pertanian: Perlu Upaya Akselerasi Pertumbuhan*.
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 503–528. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>
- Junaidi, H. (2011). *STUDI TERHADAP KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/1904>
- Lesmana, T. (2010). Land Reform dan Pengentasan Kemiskinan: Pelajaran dari China. *LIPI*.
- Malau, N. A. (2016). EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PARADIGMA DAN STRATEGIBARU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2.
- Mubyarto. (1999). *Reformasi sistem ekonomi: Dari kapitalisme menuju ekonomi kerakyatan*. Aditya Media.
- Nasrul, W. (2012). Pengembangan kelembagaan pertanian untuk peningkatan kapasitas petani terhadap pembangunan pertanian. *Menara Ilmu*, 3.
- Rosmiati, E. (2012). *KOPERASI SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN*.
- Rubaie, A. (2007). *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum* (Ed. 1., cet. 1). Bayumedia Pub.
- Suseno, D., & Suyatna, H. (2007). Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS GADJAH MADA*, 10.